



PT. BPR JWALITA TRENGGALEK  
(PERSERODA)

🏠 Jl.Panglima Sudirman No.35-37 Trenggalek, Trenggalek

☎ 0355796640

📞 0355796639

# 2023

# LAPORAN

## PENERAPAN TATA KELOLA

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali,



calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR JWalita TRENGGALEK (PERSERODA)**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

#### **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DWI FRAIDIANRIANI,SE
	NIK	: 3503065512780001
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.</li> <li>2. Memimpin dan mengkoordinasikan operasional kantor sehari-hari utamanya dari sisi bisnis sehingga berjalan dengan baik.</li> <li>3. Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>4. Memastikan bahwa ketentuan GCG berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>5. Memantau efektivitas kerja audit intern dan menindaklanjuti hasil temuan dari audit intern.</li> </ol>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: LINDA WULANINGTYAS,SE
	NIK	: 3503114209800004
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian;</li> <li>2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain;</li> <li>4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>5. Melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan meyakini bahwa pedoman kerja,sistem dan prosedur kepatuhan telah berjalan efektif;</li> </ol>



**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
 Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
 Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
 Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.  
 Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DR.IR.H.MULYADI WR,MMT
	NIK	: 3503110608540004
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan,memantau dan memgevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: IR,JOKO IRIANTO,MSI
	NIK	: 3503110110650001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepad DIdireksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan,memantau dan mengevaluasi pelaksanan kebijakan strategis BPR.
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>		



Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
 Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.  
 Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.  
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.  
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWI FRAIDIANRIANI,SE	3503065512780001	-	-
2	LINDA WULANINGTYAS,SE	3503114209800004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWI FRAIDIANRIANI,SE	3503065512780001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LINDA WULANINGTYAS,SE	3503114209800004	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWI FRAIDIANRIANI,SE	3503065512780001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LINDA WULANINGTYAS,SE	3503114209800004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR.IR.H.MULYADI WR,MMT	3503110608540004	-	-
2	IR.JOKO IRIANTO,MSI	3503110110650001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.IR.H.MULYADI WR,MMT	3503110608540004	tidak ada	tidak ada	HJ.PENNY SUGIHARTI-Ada hubungan
2	IR.JOKO IRIANTO,MSI	3503110110650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.IR.H.MULYADI WR,MMT	3503110608540004	tidak ada	tidak ada	HJ.PENNY SUGIHARTI-Istri
2	IR.JOKO IRIANTO,MSI	3503110110650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada



**F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	99.000.000	2	47.520.000
2	Tunjangan	2	476.520.000	2	193.016.400
3	Tantiem	2	44.037.000	2	17.639.899
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			619.557.000		258.176.299

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Fasilitas Komunikasi/Pulsa	Tidak ada

**G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,92	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,58	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,75	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,65	1



## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-3-27	3	1. Penurunan NPL,Direksi untuk lebih mengoptimalkan penagihan dan kerja sama dengan APH untuk penyelesaian kredit bermasalah. 2. Pertumbuhan kredit BPR untuk lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan sebelum hari raya Idul Fitri. 3. Rolling Pejabat Eksekutif ( Kabag Kredit ) untuk dipertimbangkan Direksi,karena terlalu lama dan dapat berpotensi risiko. 4. Evaluasi Pelasanaan Program Baru BPR, antara lain - Program KPR kerja sama dengan SMF sudah berjalan dan merupakan program yang belum dimiliki oleh BPR diwilayah Trenggalek. -Program Sanitasi kerjasama dengan Water Org harus ekstra hati-hati,dan sumberbpengembalian harus jelas. -Program Kredit Sindikasi dengan BPR Milik Pemkab di Jawa Timur lebih prudential,dari sisi usaha dan agunan. - Program Kredit Fintech kerjasama dengan Komunal dan P2P lainnya harus sesuai dengan RAC yang ditepkan dan potensi yang bagus untuk bisnis BPR.
2	2023-5-12	3	1. Terkait Rekomendasi dan Evaluasi atas strategi RBB Tahun 2023 yang melibatkan peran Pemerintah Daerah : a. Rencana Pengelolaan Payroll PPPK. b . Rencana Pengelolaan Payroll BLUD . c. Rencana Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA). 2. Terkait Pelaksanaan Program APU-PPT : a. Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan dan menindaklanjuti hasil temuan OJK tentang APU PPT yang telah menjadi temuan pemeriksaan tahun 2022 dengan akan menyelenggarakan Pendidikan APU PPT dan PPPSPM pada tanggal 18 Maret 2023. b. Dengan pendidikan Intern nanti diharapkan Pelaksanaan Program APU PPT ke depan akan semakin terstruktur sehingga tidak terjadi temuan kesalahan berulang pada pemeriksaan selanjutnya. 3. Hasil Pemeriksaan Audit Intern akan dilakukan evaluasi dan diberikan Rekomendasi oleh Direktur Utama sebagai atasan langsung Pejabat Eksekutif Audit Intern danDewan Komisaris jika diperlukan.
3	2023-7-5	3	1. Evaluasi Semester II Kinerja BPR Jwalita Tahun 2023. 2. Evaluasi Pegawai dan Kinerja Pegawai. 3. Daftar Kunjungan AO untuk dimonitoring. 4. Pendidikan Intern APU PPT dan Penyelesaian Pinjaman bermasalah. 5. Tunjangan Cuti Semester II untuk dikeluarkan dan disiapkan untuk Direksi dan Pegawai Bpr Jwalita.
4	2023-9-7	3	1. Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023. 2. Pertumbuhan kredit harus memperhatikan prinsip kehati hatian. 3. Jaminan kredit untuk Appasial Desa/Penilaian Desa untuk SHM. 4. Penurunan NPL dan Hindari pembentukan PPAP. 5. Inovasi Produk baru di Tahun 2023 yaitu Digitalisasi pelayanan masyarakat dan Program Simarnas Go (Tabungan Berhadiah) dipantau pelaksanaannya.
5	2023-12-1	3	1. Pembahasan Rencana Bisnis BPR tahaun 2024, mencakup : Pertumbuhan Aset ,Pertumbuhan Kredit dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. 2. Penurunan NPL,dan kualitas Kredit yang bagus supaya tidak ada pembentukan PPAP yaitu Direksi untuk lebih mengoptimalkan penagihan dan kerja sama denga APH untuk menyelesaikan kredit bermasalah di tahun 2024 (Gugatan sederhana dan SKK Kejaksaan). 3. Evaluasi Pelaksanaan Program Baru untuk dioptimalkan,yaitu : Program Simarmas, KPR, Kredit Sidikasi dan Pemberhentian Program Kredit Fintech.
6	2024-12-27	3	1. Pembahasan Rencana Bisnis BPR 2024 (Pertumbuhan Asset, Pertumbuhan Kredit,Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga). 2. Penurunan NPL dan Kualitas kredit bagus supaya tidak ada pembentukan PPAP, yaitu Direksi untuk lebih mengoptimalkan penagihan dan kerja sama dengan APH untuk penyelesaian kredit bermasalah di tahun 2024 (Gugatan Sederhana dan SKK Kejaksaan). 3. Evaluasi Pelaksanaan Program Baru BPR untuk dioptimalkan. 4. Rencana pergantian Komisaris BPR JWALITA,Dikarenakan Bpk JOKO IRIANTO saat ini menjabat di Pemprov Jatim (Tidak mewakili Pemerintah Daerah Kab.Trenggalek).



## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DR.IR.H.MULYADI WR,MMT	3503110608540004	0	0	0,00%
2	IR.JOKO IRIANTO,MSI	3503110110650001	0	0	0,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-02-02	Sosial	Kegiatan 100 Abad PCNU	PCNU	2.000.000
2	2023-02-17	Sosial	SOCCER LEAGUE	PSSI	3.000.000
3	2023-02-17	Sosial	BIO REFTEEK CINTA	Dinas Perikanan	1.000.000
4	2023-04-14	Sosial	Santunan Fakir Miskin dan Duafa lingkungan kantor BPR Jwalita	Fakir miskin dan Duafa lingkungan kantor BPR Jwalita	20.000.000
5	2023-05-22	Sosial	Labuh Laut Sembonyo	Lingkungan Pantai prigi	2.500.000
6	2023-05-24	Sosial	Pemberdayaan Desa Wisata	Desa Sawahan	5.000.000
7	2023-06-16	Sosial	Bantuan Hewan Qurban (5 Ekor Kambing)	kaum dhuafa	20.000.000
8	2023-06-01	Sosial	Pemberdayaan PKK (Januari-Juni)	PKK 8 Kecamatan	21.000.000
9	2023-06-03	Sosial	Bersih Desa (7 Desa) Bulan Mei dan Juni	7 Desa	3.500.000
10	2023-07-20	Sosial	Acara PPDl	PPDI Kab.Trenggalek	12.500.000
11	2023-10-11	Sosial	Bantuan Air Nersih	Desa Di Kecamatan Watulimo,Dongko dan Bendungan	1.342.200
12	2023-12-07	Sosial	Bantuan Kegiatan Senam Massal	Dharma Wanita	1.000.000
13	2023-12-18	Sosial	Kegiatan Harlah PPDl	PPDI Kab.Trenggalek	2.000.000
14	2023-08-14	Sosial	HUT RI Ke.78 Kab.Trenggalek	Panitia HUT RI Kab. Trenggalek	8.514.650
15	2023-08-14	Sosial	Kegiatan Pesta Rakyat 2023 Kab.Trenggalek	Panitia Kegitan Pestab Rakyat Kab.Trenggalek Th.2023	1.500.000



## M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda), Terima Kasih.

**Trenggalek, 30 Januari 2024**  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda)

**DR.IR.H.MULYADI WR,MMT**  
Komisaris Utama

**DWI FRAIDIANRIANI,SE**  
Direktur Utama